

KINERJA BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN MODAL

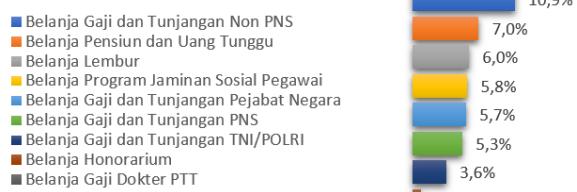
Realisasi dan Pertumbuhan Belanja

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai, 2015-2018 (triliun Rp)

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	76,00	86,55	86,93	88,76
2	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	53,29	55,54	55,60	59,26
3	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0,58	0,62	0,63	0,69
4	Belanja Gaji Dokter PTT	1,01	1,48	0,35	0,14
5	Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	5,74	6,85	9,92	7,82
6	Belanja Honorarium	1,67	2,02	1,42	1,72
7	Belanja Lembur	0,62	0,71	0,73	0,74
8	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	47,54	51,90	54,33	71,84
9	Belanja Pensiun dan Uang Tunjung	89,87	94,25	97,52	110,21
10	Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai	4,82	5,22	5,30	5,71
Jumlah		281,14	305,14	312,73	346,89

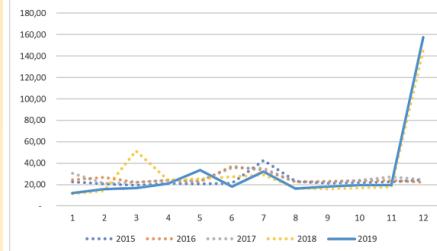
Pertumbuhan Belanja Pegawai, 2015-2018



Proporsi Belanja Pegawai, tahun 2015-2020

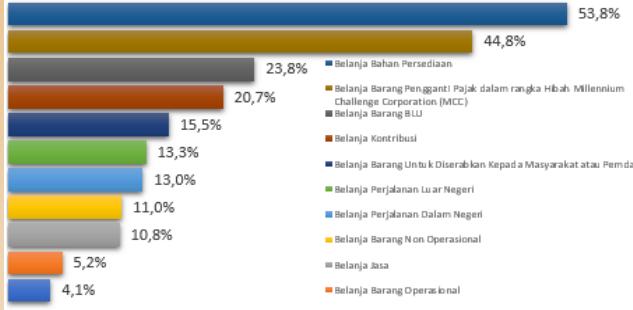
Tahun	Anggaran (triliun Rp)	Realisasi (triliun Rp)	% thd BPP	% thd APBN	% Realisasi
2015	293,13	281,14	22,2%	14,8%	95,9%
2016	342,45	305,14	26,2%	16,3%	89,1%
2017	343,66	312,73	25,1%	16,1%	91,0%
2018	365,69	346,89	25,1%	16,5%	94,9%
2019 (outlook)	381,56	375,84	23,3%	15,5%	98,5%
2020 (APBN)	416,20	-	20,0%	13,3%	-

Pola Penyerapan Belanja Pegawai, 2015-2019



Belanja Barang

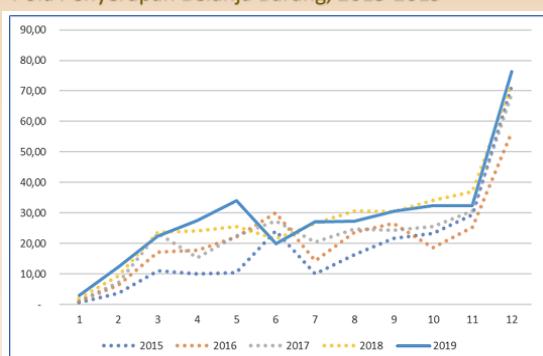
Pertumbuhan Belanja Barang , 2015-2018



Realisasi Belanja Barang, 2015-2018 (miliar Rp)

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Belanja Barang Operasional	37.093,07	34.626,55	35.348,78	43.230,12
2	Belanja Barang Non Operasional	55.808,16	51.389,07	54.833,06	76.260,72
3	Belanja Barang Pengantap Pajak dalam rangka Hibah Millennium Challenge Corporation (MCC)	3,84	10,91	7,17	11,64
5	Belanja Kontribusi	180,29	194,36	191,86	317,06
6	Belanja Bahan Persediaan	5.021,34	8.342,34	14.956,68	18.280,49
7	Belanja Jasa	26.279,37	26.808,30	29.604,09	35.723,27
8	Belanja Pemeliharaan	33.801,51	30.259,36	45.501,07	38.181,11
9	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	27.361,75	31.359,65	31.228,72	39.487,59
10	Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.196,54	2.373,96	2.839,72	3.196,17
11	Belanja Barang BLU	19.368,72	34.718,79	36.570,86	36.718,29
12	Belanja Barang Untuk Diserabah Kepada Masyarakat atau Pemda	19.535,85	21.135,03	20.035,72	30.103,54
Jumlah		226.650,45	241.218,31	271.117,73	321.510,00

Pola Penyerapan Belanja Barang, 2015-2019

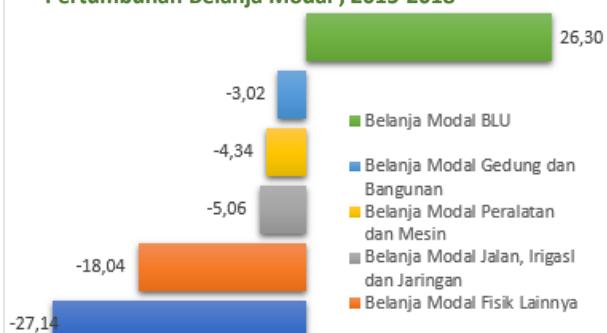


Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal, 2015-2018 (triliun Rp)

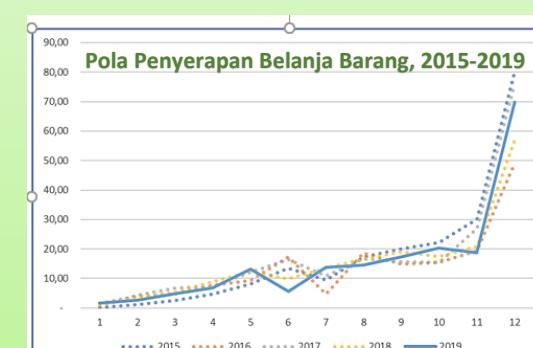
No.	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Belanja Modal Tanah	9,06	4,62	3,42	3,50
2	Belanja Modal Fisik Lainnya	5,58	3,96	3,42	3,07
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	98,59	63,96	80,44	84,37
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,11	68,17	89,60	61,38
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29,79	25,28	27,82	27,17
6	Belanja Modal BLU	2,30	3,48	3,95	4,63
Jumlah		215,43	169,47	208,66	184,13

Pertumbuhan Belanja Modal , 2015-2018



Proporsi Belanja Modal, tahun 2015-2020

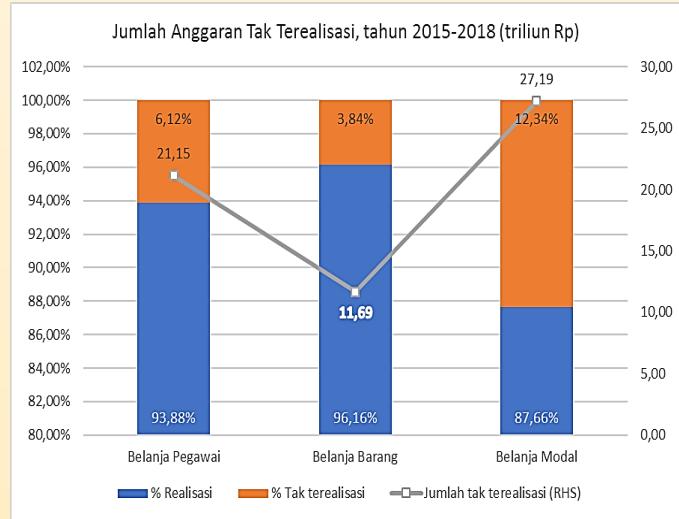
Tahun	Anggaran (triliun Rp)	Realisasi (triliun Rp)	% thd BPP	% thd APBN	% Realisasi
2015	275,79	215,43	20,9%	13,9%	78,1%
2016	206,57	169,47	15,8%	9,9%	82,0%
2017	226,14	208,66	16,5%	10,6%	92,3%
2018	203,88	184,13	14,0%	9,2%	90,3%
2019 (outlook)	189,34	180,92	11,6%	7,7%	95,6%
2020 (APBN)	209,39	-	17,5%	11,6%	-



RATA-RATA REALISASI BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN MODAL

Rata-rata Realisasi Porsi Belanja, 2015-2018						
	Anggaran (tril.Rp)	Realisasi(tril. Rp)	% thd BPP	% thd APBN	% Realisasi	Pertumbuhan 2015-2019*
Belanja Pegawai	345,30	324,35	24,41%	15,84%	93,88%	7,6%
Belanja Barang	304,63	293,17	21,49%	13,94%	96,16%	9,4%
Belanja Modal	220,34	191,72	15,77%	10,25%	87,66%	-3,5%

Rata-rata penyerapan belanja modal dalam 2015-2018 sebesar 87,66 persen atau terdapat rata-rata 12,34 persen atau senilai rata-rata Rp27,19 triliun anggaran yang tidak terserap dalam periode 2015-2018. Untuk belanja pegawai, rata-rata persentase anggaran yang tidak terserap sebesar 6,12 persen atau senilai rata-rata Rp12,15 triliun, dan untuk belanja barang, persentase anggaran yang tidak terserap sebesar 3,84 persen atau senilai rata-rata Rp11,69 triliun.



Tantangan Penumpukan Realisasi Anggaran di Akhir Tahun



Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA :

- Kelancaran Pelaksanaan Anggaran** (Pembayaran/Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM)
- Mendukung Manajemen Kas** (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D)
- Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan** (LKKL/LKPP) (Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja)

Upaya Mengatasi Penyerapan Anggaran

Untuk menghindari adanya penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun, pemerintah dan parlemen dapat membangun mekanisme/mengagendakan pembahasan realisasi anggaran per triwulan dengan masing-masing pasangan kerja komisi untuk dapat dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh kementerian/lembaga, sehingga dapat segera dirumuskan kebijakan-kebijakan yang memastikan adanya serapan anggaran secara merata di sepanjang tahun anggaran dengan tetap mengedepankan aspek akuntabilitas anggaran. Sinergi peran pemerintah dan parlemen ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas anggaran yang dapat menggerakkan seluruh sektor ekonomi dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat.